

Pemberdayaan Masyarakat Adat melalui Pariwisata Ilmiah: Pembelajaran dari Kampung Persiapan Malasigi di Provinsi Papua Barat Daya

Kafa Abdallah Kafa¹, Wahid Nur Kartiko², Harsanto Mursyid³,
Danang Arif Darmawan⁴

Submitted: December 22, 2025; Revised: January 2, 2026; Accepted: 5 January, 2026

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran pariwisata ilmiah sebagai strategi pemberdayaan masyarakat multipihak dalam konteks masyarakat adat di Kampung Persiapan Malasigi, Provinsi Papua Barat Daya. Dengan mengadopsi perspektif pariwisata ilmiah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, penelitian ini menunjukkan bagaimana integrasi pengetahuan lokal, konservasi ekologis, dan inovasi kolaboratif dapat memperkuat agensi sosial dan ekonomi masyarakat adat. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang pengambilan datanya dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan *Focus Group Discussion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata ilmiah tidak hanya mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan memperluas legitimasi sosial melalui praktik wisata berbasis pengetahuan. Dalam hal ini, kolaborasi multipihak seperti FFI sebagai NGO konservasi, PT Pertamina EP Papua Field sebagai penyelenggara Program CSR MATA HATI MALASIGI, dan masyarakat adat Malasigi sebagai aktor utama telah berperan sebagai fasilitator kolaboratif yang memperkuat kapasitas lokal secara etis dan adaptif melalui pemberdayaan berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Kolaborasi Multipihak; Pariwisata Ilmiah; Pemberdayaan Masyarakat Adat, Pengetahuan Lokal dan Konservasi

Abstract

This article analyzes the role of scientific tourism as a multi-stakeholder community empowerment strategy in the context of indigenous communities in Malasigi Preparation Village, Southwest Papua Province. By adopting the perspective of scientific tourism as a community empowerment strategy, this study shows how the integration of local knowledge, ecological conservation, and collaborative innovation can strengthen the social and economic agency of indigenous communities. This study uses qualitative methods with a case study approach, collecting data through in-depth interviews, participatory observation, and Focus Group Discussions. The results show that scientific tourism not only diversifies community income sources but also strengthens cultural identity and expands social legitimacy through knowledge-based tourism practices. In this case, multi-stakeholder collaboration, such as FFI as a conservation NGO, PT Pertamina EP Papua Field as the organizer of the MATA HATI MALASIGI CSR Program, and the Malasigi indigenous community as the main actors, has played a role as collaborative facilitators that strengthen local capacity in an ethical and adaptive manner through community-based empowerment.

Keyword: Multi-Stakeholder Collaboration; Scientific Tourism; Indigenous Community Empowerment; Local Knowledge and Conservation

Pendahuluan

Praktik pembangunan di Indonesia semakin menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat seragam, teknokratis, dan sentralistik tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas

persoalan di aras lokal. Keragaman sosial, budaya, dan ekologi sudah menjadi karakter utama wilayah-wilayah di Indonesia yang menuntut adanya model pembangunan yang kontekstual. Artinya, proses pembangunan

¹ Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, *email correspondence:* kafaabdallahkafa@gmail.com

² Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

³ Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

⁴ Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

perlu memperhatikan cara hidup, sistem nilai, dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam proses ini, upaya membangun masyarakat tidak dapat dipahami sebagai intervensi tunggal oleh satu entitas seperti negara saja, melainkan sebagai proses kolektif-kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, korporasi, masyarakat, hingga akademisi sebagai satu kesatuan utuh dengan peran yang saling melengkapi (Krisdyatmiko, 2012; Kafaa, 2019).

Pendekatan kolaboratif ini menjadi landasan penting dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial yang beragam. Terlebih, dalam konteks ini, penting untuk menyoroti posisi masyarakat adat sebagai aktor kunci sekaligus kelompok yang paling rentan dalam struktur pembangunan nasional (Karso, 2025). Ini menunjukkan bahwa pendekatan multipihak menjadi semakin relevan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh banyak aktor.

Dalam berbagai temuan studi, sering kali masyarakat adat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap marginalisasi karena keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi formal, tekanan terhadap sumber daya alam yang mereka andalkan, serta kesenjangan pengakuan terhadap pengetahuan dan hak-hak budaya lokal (Survival International, 2016; Tauli-Corpuz et al., 2018). Masyarakat adat sering kehilangan hak atas tanah mereka karena klaim tumpang tindih dengan izin tambang atau perkebunan besar, yang menyebabkan hilangnya sumber penghidupan utama. Mereka juga jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, padahal wilayah mereka sering menjadi sasaran proyek-proyek industri yang merusak lingkungan dan budaya lokal (Karso, 2025; Kennedy et al., 2023).

Selain itu, ketergantungan masyarakat adat terhadap lingkungan hidup dan kohesi sosial yang berkelanjutan sering kali tidak tercerminkan secara memadai dalam praktik pembangunan ekonomi ekstraktif-eksploitatif dan dilihat sebagai sesuai yang perlu dibenahi (Schilling-Cacaflro & Flemmer, 2015). Kondisi tersebut semakin memperlemah posisi tawar kolektif dan kapasitas adaptif masyarakat adat dalam menghadapi dinamika eksternal seperti perubahan iklim, penetrasi pasar global, dan transformasi struktur agraria (Shonhe & Tsitsidzashe, 2021). Oleh sebab itu, diperlukan

pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan material, tetapi juga menghormati dan memperkuat identitas budaya serta sistem pengetahuan lokal mereka.

Sejalan dengan hal tersebut, konsep pariwisata juga mengalami pengembangan ke arah yang lebih memberdayakan, berkelanjutan, dan inklusif sebagai wadah bagi pendekatan multiaktor yang relevan dalam arus pembangunan. Berbagai kerangka kerja baru seperti pariwisata ilmiah (*scientific tourism*) mulai mendapatkan perhatian dalam kajian akademik sebagai pendekatan alternatif yang berpotensi menjembatani penelitian ilmiah, upaya konservasi lingkungan, dan interaksi bermakna dengan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata (Balford et al., 2009; Wearing & Neil, 2009). Pariwisata ilmiah merupakan bentuk pariwisata yang berakar pada kegiatan ilmiah dan eksplorasi berbasis pengetahuan. Pariwisata ilmiah tidak hanya bertujuan untuk menikmati destinasi dan pengalaman baru, tetapi juga berkontribusi pada penelitian, pendidikan, dan pemahaman mendalam terhadap ekosistem lokal dan budaya masyarakat (Melenez-Roman et al., 2025; Rodriguez-Herrera et al., 2025).

Model pariwisata ini menawarkan peluang untuk mengintegrasikan produksi pengetahuan ilmiah dengan pemberdayaan ekonomi lokal melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses penelitian dan pengelolaan destinasi wisata. Sebagai contoh, di beberapa wilayah Indonesia seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, pariwisata ilmiah telah diterapkan sebagai model pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan wisatawan dalam riset partisipatif terkait praktik adat dan pengelolaan ekologi lokal. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mempertahankan identitas di tengah tekanan globalisasi (Wall & Mathieson, 2006).

Secara nyata, pendekatan pariwisata ilmiah telah menunjukkan kontribusinya terhadap pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Kontribusi tersebut mencakup peningkatan pemberdayaan komunitas lokal melalui diversifikasi mata pencaharian, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta legitimasi dan pengakuan terhadap nilai budaya dan pengetahuan tradisional dalam konteks

global (Mbaiwa & Stronza, 2010; Goodwin & Santilli, 2009). Meskipun literatur mengenai pariwisata dan pemberdayaan masyarakat telah berkembang pesat, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan ketiga elemen, yakni pemberdayaan masyarakat, pariwisata ilmiah, dan masyarakat adat, masih relatif terbatas.

Studi tentang pariwisata ilmiah sejauh ini umumnya berfokus pada aspek edukasi, konservasi, atau motivasi wisatawan (misalnya, Rääkkönen et al., 2021; Conti et al., 2021), tetapi belum banyak yang mengkaji bagaimana pendekatan ini dapat bersinergi dengan strategi pemberdayaan masyarakat adat secara berkelanjutan (Bourlon & Torres, n.d.; Slocum et al., 2015). Hal ini menunjukkan adanya celah penting dalam literatur yang perlu dijawab melalui pendekatan interdisipliner dan kontekstual.

Praktik pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pariwisata ilmiah kiranya telah membuka peluang baru bagi para pemangku kepentingan untuk merancang program yang tidak hanya mendukung konservasi alam dan budaya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat (Blackman et al., 2017). Model integrasi ini memungkinkan terciptanya sinergi antara tujuan ekonomi, agenda penelitian ilmiah, dan kebutuhan komunitas lokal melalui mekanisme partisipasi aktif, pembagian manfaat yang adil, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal (Stronza et al., 2019). Pendekatan holistik ini mencerminkan bentuk kolaborasi strategis yang berakar pada penghormatan terhadap hak asasi masyarakat, pengakuan atas kapasitas lokal, serta penciptaan nilai bersama (*shared value*) antarsektor. Dengan demikian, pariwisata ilmiah yang diintegrasikan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konservasi dan edukasi, tetapi juga sebagai *platform* untuk memperkuat agensi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis keterkaitan antara strategi pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata ilmiah, dan penguatan kapasitas masyarakat adat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, artikel ini mengeksplorasi bagaimana pendekatan tersebut dapat memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat

adat sekaligus menjaga integritas ekologi dan keberlanjutan budaya lokal dalam konteks tekanan pembangunan yang semakin intensif.

Fokus pembahasan artikel ini berangkat dari hasil penelitian empiris di Kampung Adat Malasigi, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Malasigi merupakan desa wisata dengan banyak penghargaan termasuk salah satunya juara 1 Desa Wisata Rintisan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tahun 2024 yang secara bersamaan menghadapi ancaman pengebangan pohon dan pembukaan lahan perkebunan sawit. Lokasi ini dipilih sebagai kasus studi karena menunjukkan upaya mengintegrasikan konservasi hutan berbasis masyarakat dengan pengembangan pariwisata ilmiah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat sebagai pengelola utama dan didukung oleh berbagai pihak termasuk NGO, korporasi, dan juga pemerintah.

Kerangka Konseptual

Pariwisata ilmiah merupakan konsep pariwisata yang menggabungkan kegiatan pariwisata dengan tujuan ilmiah, baik untuk kepentingan riset, pendidikan, maupun konservasi, yang dalam pelaksanaannya sering kali bernapaskan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya pelestarian lingkungan alam dan budaya, sekaligus sebagai upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan aktivitas pariwisata yang bertanggung jawab (Orams & Leane, 2005). Pariwisata ilmiah berbeda dengan bentuk pariwisata massal yang sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Alih-alih menitikberatkan keuntungan ekonomi jangka pendek, pariwisata ilmiah menjadikan konservasi alam dan budaya sebagai tujuan utama yang ingin dicapai melalui keterlibatan aktif wisatawan dalam kegiatan ilmiah (Orams, 1997; Higham & Lück, 2002).

Dalam konteks konservasi alam, pariwisata ilmiah memegang peranan penting dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Wisatawan yang terlibat dalam kegiatan ini biasanya tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, melainkan turut serta dalam aktivitas penelitian, *monitoring*,

atau pengumpulan data lingkungan. Contohnya termasuk studi populasi satwa liar, inventarisasi spesies tumbuhan, pemetaan ekosistem, hingga pemantauan kualitas air dan udara (Beeton, 2006; Miller, Auyong, & Hadley, 2010). Partisipasi wisatawan dalam pengumpulan data ilmiah ini menjadi sangat berarti dalam mendukung perencanaan konservasi karena memperluas jangkauan pemantauan dan menambah sumber daya manusia dalam penelitian. Di Indonesia, yang kaya akan keanekaragaman hayati tropis, pariwisata ilmiah dapat mendukung riset mengenai spesies endemik yang terancam punah, seperti burung cenderawasih di Papua atau Orang Utan di Kalimantan (Wood, 2002).

Pariwisata ilmiah juga berperan sebagai sarana pendidikan lingkungan yang efektif. Melalui keterlibatan langsung dalam riset dan pendampingan oleh para ahli, wisatawan memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika ekosistem, tantangan konservasi, serta pentingnya menjaga keseimbangan alam (Orams, 1997). Hal ini penting mengingat banyak kawasan konservasi di Indonesia, seperti taman nasional dan cagar biosfer, menghadapi tekanan serius akibat perambahan, deforestasi, perburuan liar, dan dampak perubahan iklim. Pariwisata ilmiah menjadikan kawasan tersebut bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai laboratorium alam untuk mendukung pendidikan dan penelitian konservasi (Beeton, 2006; Epler, 2007).

Selain aspek alam, pariwisata ilmiah juga berkaitan erat dengan konservasi budaya. Keberdayaan pariwisata ilmiah membuka peluang bagi wisatawan untuk mempelajari langsung adat, tradisi, dan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun. Partisipasi dalam penelitian antropologi, etnografi, arkeologi, dan linguistik memungkinkan wisatawan mendalami sistem sosial, ritual keagamaan, teknik kerajinan, hingga bahasa-bahasa daerah yang terancam punah (Leaper & Milne, 2008; Smith & Richards, 2013). Contoh konkret adalah kegiatan pariwisata ilmiah yang melibatkan pendokumentasian tarian tradisional, teknik menenun, atau arsitektur rumah adat. Program seperti ini membantu mendokumentasikan dan mempromosikan warisan budaya, sekaligus memperkuat posisi masyarakat adat sebagai penjaga utama budaya mereka (Wood, 2002).

Di berbagai wilayah di Indonesia seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Kalimantan,

pariwisata ilmiah dapat diimplementasikan sebagai model pariwisata berbasis komunitas yang mendukung pelestarian budaya dan ekologi. Program ini, misalnya, dapat melibatkan wisatawan dalam riset partisipatif mengenai pertanian tradisional berbasis ekologi, kosmologi masyarakat adat dalam mengelola hutan, hingga sistem hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam (Wall & Mathieson, 2006). Dengan cara ini, pariwisata ilmiah tidak hanya berkontribusi pada pelestarian budaya tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam mempertahankan identitas mereka di tengah arus globalisasi.

Prinsip keberlanjutan menjadi dasar dari pariwisata ilmiah. Berbeda dengan pariwisata konvensional, pariwisata ilmiah dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya. Praktik ini mengedepankan etika, keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi melalui pembatasan jumlah wisatawan, penerapan kode etik kunjungan, hingga pelibatan masyarakat lokal sebagai mitra utama (Orams, 1997; Weaver, 2011). Pariwisata ilmiah sejalan dengan konsep pariwisata bertanggung jawab (*responsible tourism*) dan ekowisata (*ecotourism*), tetapi menonjolkan kontribusi ilmiah yang lebih kuat, yakni pengembangan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan konservasi (Higham & Lück, 2002).

Pelaksanaan pariwisata ilmiah memerlukan perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor, mencakup pemerintah, lembaga riset, pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat lokal. Contoh praktik baik terlihat pada salah satu program di Kepulauan Galapagos, Ekuador, yang menggabungkan pariwisata dengan kegiatan ilmiah seperti pemantauan populasi iguana laut, penyu, dan burung endemik (Epler, 2007). Pendekatan serupa dapat diadaptasi di Indonesia, seperti pelibatan wisatawan dalam *monitoring* Burung Enggang di Kalimantan, pemantauan terumbu karang di Raja Ampat, atau riset biodiversitas di Taman Nasional Manuella.

Dalam konteks konservasi budaya, pariwisata ilmiah mendukung revitalisasi tradisi yang terancam punah. Program pariwisata berbasis ilmiah dapat mendokumentasikan bahasa, kesenian, sistem pertanian tradisional, hingga kearifan lokal dalam tata ruang desa adat. Kegiatan ini memberikan ruang bagi masyarakat

adat untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mempromosikan nilai-nilai luhur kepada dunia (Smith & Richards, 2013; Suansri, 2003). Pariwisata ilmiah dengan demikian mengubah wisatawan dari sekadar konsumen budaya menjadi agen yang turut mendukung pelestarian.

Namun, pelaksanaan pariwisata ilmiah juga tidak dapat terlepas dari berbagai tantangan. Adapun beberapa tantangan pengembangan pariwisata ilmiah di Indonesia meliputi infrastruktur terbatas, sulitnya aksesibilitas, keterbatasan akomodasi, lemahnya koordinasi lintas lembaga, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas SDM lokal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pariwisata ilmiah tidak menjadi bentuk baru eksploitasi budaya atau lingkungan. Perlu adanya pedoman operasional berbasis etika, termasuk mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat lokal serta sistem *monitoring* untuk memastikan keberlanjutan program (Wall & Mathieson, 2006; Weaver, 2011).

Dengan demikian, pariwisata ilmiah menawarkan paradigma baru pariwisata yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, pelestarian alam, dan sosial-budaya. Dengan menjadikan kontribusi ilmiah sebagai landasan utama, pariwisata ilmiah dapat menjadi jembatan antara konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengalaman berwisata yang bermakna. Keberhasilan implementasinya di Indonesia akan sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak dalam mengedepankan keberlanjutan dan integritas ilmiah.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan dalam metode kualitatif yang mencoba untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, program, atau individu secara mendalam dan spesifik yang menekankan pada pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa” sehingga dapat menjelaskan fenomena sosial yang diteliti (deskriptif) melalui interpretasi terkait dengan makna dibalik realitas tersebut (interpretatif) (Yin, 1981a; 1981b; Merriam, 1998; Yin, 2017; Kartiko, 2025). Dalam praktiknya, metode kualitatif studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mengupas konteks spesifik

terkait wisata di Kampung Adat Malasigi, Sorong, Papua Barat Daya yang unik sebagai aktivitas wisata yang tidak hanya bertumpu pada potensi alam saja, tetapi juga potensi sosial budaya yang penuh dengan nilai keberlanjutan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Persiapan Malasigi, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kampung Persiapan Malasigi dipilih sebagai lokus penelitian karena beberapa pertimbangan strategis, antara lain: *pertama*, kampung ini merupakan desa wisata berprestasi, termasuk peraih Juara 1 Desa Wisata Rintisan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024; *kedua*, Malasigi menghadapi tantangan serius berupa alih lahan, penebangan hutan, dan ekspansi perkebunan sawit; *ketiga*, masyarakat Kampung Persiapan Malasigi mempertahankan identitas adat yang kuat dengan sistem pengetahuan tradisional tentang pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati yang masih dipraktikkan turun temurun; *keempat*, Malasigi menjalin kolaborasi dengan berbagai sektor termasuk pemerintah daerah, perusahaan (PT Pertamina EP Papua Field melalui Program CSR MATA HATI MALASIGI), NGO (FFI), dan akademisi.

Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dalam pemilihan informan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, pengetahuan mendalam, dan posisi strategis mereka terhadap isu yang diteliti. Strategi ini ditujukan untuk memilih informan yang memiliki informasi komprehensif (*information-rich*) dan mampu memberikan wawasan yang mendalam mengenai topik yang dikaji. Total terdapat 13 informan utama yang terdiri dari beragam aktor yang merepresentasikan struktur sosial dan kelembagaan lokal seperti: pengurus kampung, pengurus adat, perwakilan ibu-ibu, perwakilan pemuda, NGO lokal, agen travel, wisatawan, dan pengurus kecamatan. Informasi yang dihimpun mencerminkan pengalaman nyata, aspirasi, dan persepsi para pelaku lokal.

Penelitian lapangan dilakukan selama 17 hari pada Juni 2025 dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi partisipatif, dan *Focus Group Discussion*

(FGD). Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan penyusunan panduan wawancara sebagai acuan meskipun kemudian wawancara dilakukan dengan alur pembicaraan yang fleksibel sehingga mampu memberikan ruang pada informan dalam mengemukakan narasi dan pengalaman mereka secara terbuka (Denzin, 2012; Carter et al., 2014; Susetiwawan et al., 2023). Wawancara dilakukan dengan menyesuaikan dan membaaur di kegiatan masyarakat sehari-hari dengan rata-rata durasi 45-46 menit. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan dengan terlibat secara langsung, baik dalam kegiatan masyarakat sehari-hari, seperti memasak, bersosialisasi, masuk hutan maupun kegiatan wisata, seperti memberikan pelayanan kepada wisatawan, mengikuti kegiatan wisata termasuk *birdwatching*, dan lain sebagainya. Observasi secara langsung dilakukan untuk memahami aktivitas keseharian masyarakat, interaksi sosial, dan proses pelaksanaan program yang terjadi dalam konteks alam dan budaya lokal (Susetiwawan et al., 2023). Selain itu, FGD yang melibatkan seluruh masyarakat Malasigi di balai pertemuan untuk menghimpun pandangan kolektif dari masyarakat tentang potensi, tantangan, dan dampak yang mereka alami secara langsung dari aktivitas pariwisata ilmiah yang diteliti. Kegiatan FGD ini juga berperan sebagai ruang validasi terhadap informasi yang telah diperoleh melalui wawancara.

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yaitu data hasil wawancara, observasi, dan FGD dikodekan dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan melalui tahapan transkripsi data, pengkodean terbuka, identifikasi kategori, dan interpretasi makna kontekstual berdasarkan pemahaman kualitatif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, diskusi kolektif, serta verifikasi langsung kepada informan dalam beberapa tahap. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terkait kehidupan dan aktivitas masyarakat adat secara partisipatif, reflektif, dan berbasis potensi lokal.

Hasil

Selayang Pandang tentang Kampung Wisata Adat Malasigi

Kawasan tutupan hutan alami Malasigi memiliki tingkat keanekaragaman hayati endemik yang tinggi. Secara ekologis, hutan Malasigi menjadi habitat bagi 131 jenis satwa liar yang terdiri dari 95 jenis burung, 13 jenis mamalia, 13 jenis amfibi, dan 10 jenis reptil. Di antara keragaman tersebut, teridentifikasi lima jenis burung cendrawasih, jumlah yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain, seperti Malakuli dan Raja Ampat yang tercatat masing-masing memiliki tiga dan dua jenis. Tingginya keanekaragaman hayati tersebut berimplikasi langsung terhadap peluang pengembangan wisata minat khusus berbasis alam. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, biodiversitas yang tinggi tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik utama, tetapi juga sebagai fondasi bagi pengembangan model wisata yang menekankan prinsip konservasi.

Selain biodiversitas, Malasigi juga memiliki lanskap alam dan kekayaan budaya yang dikembangkan sebagai atraksi wisata. Lanskap alam Malasigi meliputi Gua Wo'Batiwala, gua dengan luas ruangan sekitar 30 meter dan Air Panas Belempe, tempat sakral bagi masyarakat Malasigi. Di sisi lain, kekayaan budaya adat Suku Moi Kelim, seperti Tarian Alen, aktivitas balobe (berburu ikan pada malam hari), produksi kerajinan noken, dan cara hidup masyarakat berdampingan dengan alam hutan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kombinasi antara lanskap alam dan praktik budaya ini membentuk basis atraksi wisata multidimensional dan variatif yang mengintegrasikan aspek ekologis dan sosio-kultural.

Kombinasi potensi alam dan budaya tersebut menjadi latar belakang dan fondasi pengembangan aktivitas wisata di Malasigi. Pada dasarnya, wisata di Malasigi sudah mulai diaktivasi sejak tahun 2017 seiring dengan mulai bermukimnya Marga Fami dan Komigi, dengan kunjungan awal yang didominasi oleh wisatawan lokal ke Pemandian Air Panas. Meskipun sudah mulai teraktivasi, pengelolaan wisata belum terorganisasi secara optimal, ditandai dengan ketiadaan pencatatan, aturan kunjungan, maupun struktur pengelolaan. Transformasi menuju pengelolaan yang lebih terorganisasi sejak 2020, ketika terbangunnya

kolaborasi antara masyarakat Malasigi dan Flora Fauna Indonesia (FFI). Kolaborasi ini pada awalnya berfokus pada kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, seperti identifikasi spesies dan upaya perlindungan habitat, yang kemudian berkembang menjadi kolaborasi pengembangan masyarakat melalui pendekatan wisata berbasis alam. Dinamika ini menunjukkan proses transisi dari praktik wisata informal menuju pengelolaan yang lebih terorganisasi.

Harmonisasi antara potensi dan jaringan kolaborasi membuat Malasigi mampu mengembangkan atraksi wisata alam sekaligus wisata budaya. Atraksi wisata alam yang sudah ada di Malasigi meliputi Susur Gua Wo'batiwala, Wisata Pemandian Air Panas Belempe, dan Wisata Pengamatan Burung (*birdwatching*), sedangkan wisata budayanya meliputi Wisata Balobe Malam dan Tarian Alen. Susur Gua Wo'batiwala memiliki panjang jelajah sekitar 300 meter dengan formasi stalaktit, stalakmit,

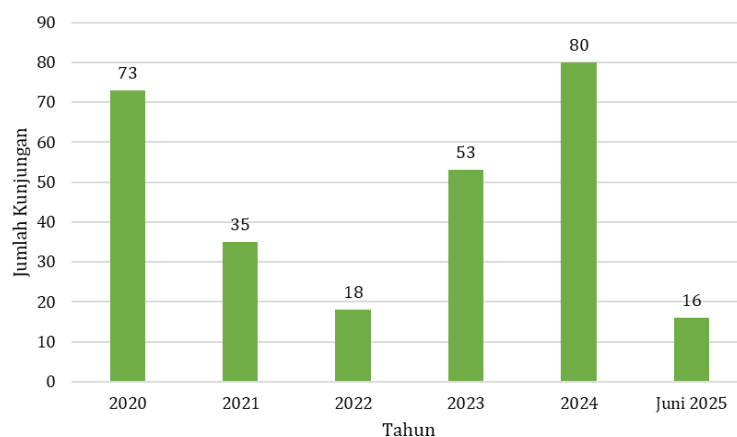
flowstone, dan empat jenis kelelawar yang tinggal di dalamnya. Wisata Pemandian Air Panas Belempe dilakukan dengan pendampingan pemandu lokal karena air panas ini memiliki nilai sakral bagi masyarakat setempat. Wisata Pengamatan Burung menawarkan pengamatan lima jenis burung cendrawasih termasuk dengan pemandu lokal, jalur *trekking*, dan menara pengamatan burung. Di sisi lain, terdapat dua atraksi berbasis budaya, yaitu aktivitas balobe yang merupakan kearifan lokal mencari ikan pada malam hari dengan menggunakan kalawai (tombak kayu dengan tiga besi tajam di ujungnya) dan sambutan Tarian Alen.

Berbagai aktivitas wisata tersebut didukung oleh amenitas dasar yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat. Amenitas dasar tersebut meliputi *homestay*, *glamping*, listrik, air, sinyal internet, penyediaan konsumsi, jalur trekking, menara pengamatan burung, perlengkapan trekking, dan lain sebagainya. Meski terus

| No. | Potensi | Keterangan |
|-----|---------------|--|
| 1. | Biodiversitas | <i>Rhinolophus euryotis</i> , <i>Hipposideros cervinus</i> , <i>Emballonura raffrayana</i> , <i>Dobsonia magna</i> , Sanca hijau, (<i>Morelia azurea</i>), Sanca permata (<i>Leiopython albertisi</i>), Kakatua koki (<i>Cacatua galerita</i>), Mambruk ubiaat (<i>Goura cristata</i>), Cendrawasih raja (<i>Cicinnurus regius</i>), Cendrawasih belah rotan (<i>Diphylodes magnificus</i>), Elang alap kelabu (<i>Accipiter hiogaster</i>), Ekidna moncong panjang barat (<i>Zaglossus bruijnii</i>), Rusa timor (<i>Rusa deer</i>), Paok hijau-papua, Cendrawasih kecil, Cendrawasih mati-kawat, Toowa cemerlang, Cekakak -pita biasa, Paok-Papua selatan, Julang papua, Kakatua Paruh-kodok pualam, Sanca papua (<i>Simalia amethystina</i>), Katak pinokio (<i>Litoria pronimia</i>), Papua bow-fingered gecko (<i>Cryptodactylus papuensis</i>), Katak litoria amboinensis, Katak Nyctimystes cf. Pallidofemora, Katak Cornufer dorsalis, Posum ekor kait dataran (<i>Pseudochirulus canescens</i>) |
| 2. | Lanskap Alam | Gua Wo'Batiwala, Air Panas Belempe |
| 3. | Sosial Budaya | Tarian Alen, Balobe, Kerajinan Noken, Pengetahuan lokal hidup dengan keberlanjutan alam |

Tabel 1. Potensi Alam, Sosial, dan Budaya Malasigi

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2025



Gambar 1. Jumlah Wisatawan Tahun 2020 - Juni 2025

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

berkembang, Malasigi menghadapi kendala serius dari sisi aksesibilitas karena kerusakan jalan penghubung antara Kota Sorong ke Malasigi. Kerusakan ini disebabkan oleh aktivitas angkutan berat pengangkut hasil penebangan hutan selama dua tahun terakhir. Akibatnya, perjalanan ke Malasigi hanya dapat ditempuh oleh kendaraan khusus dengan waktu yang lebih lama dan kondisi jalan berlumpur yang ekstrem.

Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Malasigi. Data kunjungan wisatawan Malasigi menunjukkan terjadinya penurunan signifikan pada tahun 2025. Hingga Juni 2025, tercatat hanya 16 wisatawan yang berkunjung, dengan sekitar 50 perjalanan wisata, baik domestik maupun mancanegara dibatalkan akibat keterbatasan aksesibilitas. Penurunan ini menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata Malasigi tidak hanya ditentukan oleh atraksinya dan strategi masyarakat mengembangkan kampung saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya, seperti infrastruktur, transportasi, dan layanan penunjang lainnya.

Peran Modal Sosial dan Budaya dalam Aktivitas Wisata

Pengelolaan wisata Malasigi dijalankan melalui struktur kelembagaan lokal yang saling terhubung dan ditopang oleh kegotongroyongan. Secara kelembagaan, wisata Malasigi dikelola oleh dua institusi utama, yaitu Kelompok Sadar Wisata Belempe (Pokdarwis Belempe) dan Lembaga Pengelola Hutan Kampung Malasigi (LPHK Belempe). Pokdarwis Belempe berperan sebagai eksekutor teknis pelayanan dan pengembangan wisata, sedangkan LPHK Belempe berperan sebagai pelaksana pemerintahan formal kampung yang mendukung aktivitas wisata, seperti pengelolaan air, listrik, hutan, dan sumber daya manusia.

Selain pemerintahan administrasi formal, Malasigi juga menganut pemerintahan adat yang dipimpin oleh Kepala Adat sebagai satu-satunya orang yang lulus dari sekolah adat *kambik*, yakni sebuah sistem pendidikan non-formal tradisional bagi anak laki-laki Suku Moi di Papua dengan menggunakan rumah adat (*kambik*). Di tempat ini dilakukan proses belajar-mengajar mengenai pengetahuan vital tentang alam, pertanian, pengobatan tradisional, aturan adat, dan kepemimpinan sebagai calon dewan adat (Kalami & Wahyudi, 2022). Dalam

struktur ini, pemerintahan adat berfungsi memberikan pedoman nilai dan norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Malasigi, termasuk dalam pelaksanaan aktivitas wisata dan memberikan pedoman hubungan antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam. Koeksistensi antara sistem pemerintahan formal dan adat ini menunjukkan adanya dua sistem tata kelola pemerintahan (*dual governance*) yang beriringan, yaitu administrasi formal yang berperan sebagai pelaksana teknis pemerintahan dan aktivitas wisata serta pemerintahan adat sebagai penjaga dan penyelar nilai adat dengan aktivitas wisata.

Di Malasigi, infrastruktur wisata dibangun dan dikelola secara gotong royong oleh masyarakat. Hal ini dicerminkan dari kepemilikan kolektif atas sumber daya yang ada dan keterlibatan aktif setiap anggota masyarakat dalam aktivitas wisata mulai dari pembagian peran yang terbentuk secara organik dan resolusi konflik yang diselesaikan bersama-sama. Bentuk kolektif ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh komposisi penduduk kampung Malasigi yang homogen karena hanya ditinggali oleh dua marga Suku Moi Kelim, yaitu Fami dan Komigi. Komposisi kekeluargaan yang homogen ini yang membentuk rasa saling percaya satu sama lain, solidaritas, dan nilai-nilai serta norma yang pada akhirnya membentuk modal sosial di komunitas masyarakat Malasigi.

Modal sosial ini kemudian menjadi katalisator penting dalam pengembangan wisata di Malasigi. Sebelum terjalannya kolaborasi dengan berbagai pihak, masyarakat Malasigi sudah bergotong royong membangun wisatanya secara kolektif. Salah satunya momen ketika membuka jalur *trekking* dan membangun menara pengamatan burung cendrawasih yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif bekerja sama serta saling berbagi peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan untuk menyiapkan berbagai material, membawa material ke dalam hutan membuka jalur *trekking*, serta membangun tower pengamatan burung lengkap dengan tangga dan jaring kamuflasenya. Perempuan berperan sebagai penyedia logistik dengan mengumpulkan bahan makanan dan mengolahnya di kampung sembari menjaga kampung selagi semua laki-laki menginap di hutan membangun menara pengamatan. Bahkan, anak-anak juga terlibat secara aktif

dengan berperan sebagai pengantar logistik dan makanan dari kampung ke dalam hutan. Pembagian tugas secara sadar dengan porsinya masing-masing menunjukkan pengetahuan lokal dan strategi masyarakat mengelola modal sosial sekaligus modal sumber daya manusia yang ada sehingga dapat memberikan solusi yang adaptif dan kontekstual.

Selain itu, modal sosial juga menjadi fondasi dalam operasional wisata yang tercermin dari pembagian tugas dalam fasilitasi wisata yang disepakati bersama. Pembagian tugas meliputi pemandu wisata yang biasanya menjadi tanggung jawab kelompok pemuda, sementara petugas air dan listrik menjadi tugas kepada kelompok bapak-bapak, sedangkan penyedia konsumsi diemban oleh kelompok ibu-ibu. Terakhir, tugas pengelolaan akomodasi dilakukan secara kolaboratif dengan menyesuaikan tanggung jawab yang lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial dapat dimanifestasikan sebagai motor penggerak koordinasi internal dalam pelayanan wisata.

Selain mendukung operasional wisata, modal sosial juga berperan sebagai katalisator resolusi konflik di tingkat komunitas. Meskipun solidaritas sosial relatif kuat, permasalahan internal tetap muncul sebagai bagian dari dinamika sosial. Hasil penelitian mencatat bahwa konflik, termasuk permasalahan pengelolaan keuangan wisata, diselesaikan melalui musyawarah bersama yang mengacu pada norma dan sanksi sosial-adat yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan bahwa modal sosial dan sistem adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan wisata.

Di samping modal sosial secara internal yang ada di komunitas masyarakat Malasigi (*bonding social capital*), kekuatan modal sosial juga terbentuk dari kolaborasi berbagai pihak (*bridging social capital*). Malasigi menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari NGO, seperti FFI; sektor swasta seperti PEP Papua Field; pemerintah daerah; dan akademisi. Jaringan kolaborasi ini mendorong adanya pengembangan aktivitas wisata lebih variatif dan berkembang.

Relasi dengan FFI menghasilkan berbagai kegiatan kolaborasi seperti inventarisasi biodiversitas, konservasi alam, dan pengembangan masyarakat melalui ekowisata. Selain itu, FFI juga menghubungkan Malasigi dengan pasar wisatawan sehingga membantu pemasaran wisata. Relasi dengan PT PEP Papua Field dimanifestasikan dalam program CSR MATA HATI MALASIGI. Program ini bertujuan untuk membantu pengembangan wisata melalui pelatihan dan pendampingan pengembangan pengelolaan wisata; penyediaan aliran air bersih dan filter air berbahan pelepah pisang; pengembangan perkebunan *agroforestry*; dan pelatihan pengolahan produk perkebunan untuk dijadikan sebagai sajian sekaligus oleh-oleh khas Malasigi.

Masyarakat Malasigi juga menjalin kerja sama dengan akademisi, seperti Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Nasional Jakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jaringan akademisi ini memberikan pendampingan dan inovasi untuk mendorong pengembangan aktivitas wisata seperti pelatihan pengolahan produk, pelatihan perkebunan

| NAMA | TUGAS |
|---------------------|--|
| BAPAK ADAT | MENEMANI TAMU KELILING KAMPUNG |
| BAPAK KAMPUNG | |
| BAPAK HENGGY | MENELAKAN TENTANG LARANGAN DALAM KAMPUNG |
| BAPAK ADAT | |
| BAPAK KAMPUNG | MENJELASKAN PROFIL KAMPUNG |
| BAPAK HENGGY | |
| DOOR KANTARA | ATRAKSI ANYAMAN |
| MAMA RUSTIA SU | |
| MAMA ALI GUSNA FAMI | |
| MAMA LISBETH SU | |
| MAMA ANJUNKA LUBA | |
| MAMA SILVA FAMI | |
| MAMA MARIYAM | |
| MEDOLINA FAMI | |
| MARTA NURU | |
| LUDIA SAMILO | |
| SOPHANTA MOHILALA | PENGANTAR MAKANAN DARI DAPUR KE RUMAH MAKAN |
| ABIGAIL FAMI | |
| MAGAR FAMI/SHERLY | PENJELASAN MAKANAN |
| ABIGAIL FAMI | |
| SOPHANTA MOHILALA | MENGANTAR TAMU KE HOMESTAY |
| MEDOLINA FAMI | |
| ANTON | MENGANTAR TAMU KE GLEMPING |
| YOSUA | |
| PATY | |
| DITO | |
| LUTER | |
| MELVIN | TEKNI AIR DAN LISTRIK |
| EDY | |
| DITO | GUIDE PITTA |
| MELVIN | |
| YOL | GUIDE CENDRAWASIH |
| LUTER | |
| YANUAR | |
| PATY | |
| APET | |
| ANTON | ASISTEN CHEF CATO & IBU IREN (MASAK KHUSUS TAMU) |
| MAMA MARIYAM | |
| MAMA SERA | |
| MAMA OSOK | |
| ELORENTINA | DOKUMENTASI |
| APET | |

MAMA YANG SEDANG TIDAK BERTUGAS DIMOHON UNTUK MEMBANTU MEMPERSIAPKAN MAKANAN UNTUK MASYARAKAT

| NAMA | TUGAS |
|---------------------|--|
| BAPAK ADAT | MENEMANI TAMU KELILING KAMPUNG |
| BAPAK KAMPUNG | |
| BAPAK HENGGY | MENELAKAN TENTANG LARANGAN DALAM KAMPUNG |
| BAPAK ADAT | |
| BAPAK KAMPUNG | MENJELASKAN PROFIL KAMPUNG |
| BAPAK HENGGY | |
| DOOR KANTARA | ATRAKSI ANYAMAN |
| MAMA RUSTIA SU | |
| MAMA ALI GUSNA FAMI | |
| MAMA LISBETH SU | |
| MAMA ANJUNKA LUBA | |
| MAMA SILVA FAMI | |
| MAMA MARIYAM | |
| MEDOLINA FAMI | |
| MARTA NURU | |
| LUDIA SAMILO | |
| SOPHANTA MOHILALA | PENGANTAR MAKANAN DARI DAPUR KE RUMAH MAKAN |
| ABIGAIL FAMI | |
| MAGAR FAMI/SHERLY | PENJELASAN MAKANAN |
| ABIGAIL FAMI | |
| SOPHANTA MOHILALA | MENGANTAR TAMU KE HOMESTAY |
| MEDOLINA FAMI | |
| ANTON | MENGANTAR TAMU KE GLEMPING |
| YOSUA | |
| PATY | |
| DITO | |
| LUTER | |
| MELVIN | TEKNI AIR DAN LISTRIK |
| EDY | |
| DITO | GUIDE PITTA |
| MELVIN | |
| YOL | GUIDE CENDRAWASIH |
| LUTER | |
| YANUAR | |
| PATY | |
| APET | |
| ANTON | ASISTEN CHEF CATO & IBU IREN (MASAK KHUSUS TAMU) |
| MAMA MARIYAM | |
| MAMA SERA | |
| MAMA OSOK | |
| ELORENTINA | DOKUMENTASI |
| APET | |

MAMA YANG SEDANG TIDAK BERTUGAS DIMOHON UNTUK MEMBANTU MEMPERSIAPKAN MAKANAN UNTUK MASYARAKAT

Gambar 2. Pembagian Peran dalam Wisata Malasigi

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2025

agroforestry, pelatihan pengelolaan wisata, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, perguruan tinggi lokal juga memberikan kontribusi dalam bentuk fasilitas yang salah satunya adalah panel surya untuk sumber listrik *homestay*. Terakhir, Malasigi juga mendapatkan dukungan dari pemerintah mulai dari dukungan dana hingga rekognisi dalam bentuk apresiasi. Ini menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat di lingkungan komunitas masyarakat juga dapat mendorong perluasan jejaring yang lebih luas dengan semangat yang sama.

Integrasi Pengetahuan Ekologis Tradisional

Pengembangan wisata Malasigi memiliki kaitan erat dengan pengetahuan dan prinsip hidup komunitas masyarakat Malasigi. Mereka memiliki pedoman yang berbunyi: "*Hutan adalah Mama, Kitong yang harus jaga, kitong yang harus merawat, agar hutan tetap beri kitong kehidupan*" yang memiliki makna bahwa masyarakat Malasigi menganggap hutan adalah ibu sekaligus sumber kehidupan yang harus dijaga. Nilai-nilai untuk memanfaatkan hutan secukupnya menjadi pedoman hidup dan betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Malasigi hanya menggunakan kayu yang sudah tumbang ataupun mengambil secukupnya untuk kebutuhan membangun rumah atau membangun fasilitas wisata. Dengan begitu, tidak banyak pohon yang ditebang dan mengubah lanskap terlalu signifikan. Ketika banyak terjadi penebangan pohon yang masif dan pembukaan lahan sawit di Papua yang menawarkan banyak keuntungan ekonomi, masyarakat Malasigi tetap bertahan dengan nilai-nilai keberlangsungan lingkungannya dan memanfaatkan hasil hutan dengan prinsip kecukupan dalam memenuhi kebutuhan.

Pada konteks pola hidup konsumsi dan aktivitas ekonomi, masyarakat Malasigi hanya mengambil hasil hutan untuk dua hal, yaitu kebutuhan pangan dan berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam berburu, masyarakat tidak menggunakan senapan, melainkan menggunakan jebakan yang dipasang. Mereka meyakini bahwa berburu menggunakan senapan dapat mengganggu keseimbangan hidup berbagai satwa terutama burung-burung di hutan karena suaranya yang keras. Sama halnya dalam mengambil hasil dari perairan, masyarakat Malasigi juga tidak menggunakan alat setrum, jaring, atau

senapan, tetapi mereka menggunakan *kalawai* yang dimaksudkan untuk tidak merusak siklus reproduksi ikan dan mengambil secukupnya untuk kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Malasigi juga menjaga tradisi dan mitos yang sudah diwariskan sedari dulu. Terdapat berbagai peraturan yang diatur secara adat, seperti jam masuk hutan dan tata cara masuk hutan. Sebelum memasuki hutan, masyarakat selalu mengajak wisatawan untuk datang ke Air Panas Belempe dan dikenalkan dengan nenek moyang. Selain itu, ini memungkinkan wisatawan untuk turut belajar cara masyarakat Malasigi hidup dan menjaga ruang hidup mereka. Terdapat pula peraturan seperti larangan bagi perempuan yang sedang menstruasi untuk masuk hutan, larangan untuk ke Air Panas Belempe jika sudah memakan makanan hari kemarin, dan tradisi memakan makanan hangat sebelum ke Air Panas Belempe.

Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat kemudian diintegrasikan dengan aktivitas wisata sebagai satu kesatuan cara hidup. Sinkronisasi antara pengetahuan lokal dengan aktivitas wisata dilakukan baik dalam membangun wisata maupun dalam operasional dan atraksi wisata. Dalam membangun wisata secara non-material, masyarakat Malasigi selalu mempertimbangkan aktivitas wisata agar tidak menyalahi adat mereka, seperti membuat SOP yang disesuaikan dengan peraturan adat. Selain itu, dalam menjalin kolaborasi, masyarakat Malasigi juga mempertimbangkan apakah pihak yang akan menjalin kerja sama sejalan dengan nilai mereka atau hanya ingin mengeksploitasi alam. Dalam membangun fasilitas wisata secara fisik pun masyarakat hanya mengambil secukupnya atau hanya menggunakan pohon yang sudah tumbang.

Pengetahuan lokal juga disinkronisasikan dalam operasional dan atraksi wisata. Wisatawan yang datang ke Malasigi disambut dengan Tarian Alen yang merupakan tarian tradisional Suku Moi sebagai simbol ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan. Tarian Alen yang dulunya hanya ditunjukkan khusus di pendidikan adat Kambik yang bersifat sakral, tetapi kemudian menjadi tarian untuk menyambut tamu wisatawan yang datang ke Malasigi. Wisatawan juga dapat merasakan pengalaman berburu ikan di malam hari dengan paket wisata Balobe Malam yang merupakan aktivitas berburu ikan di menggunakan *kalawai* (tombak kayu

dengan besi bermata tiga). Wisatawan juga dapat membawa pulang kerajinan noken yang merupakan kantong tas yang terbuat dari serta lapisan dibalik kulit kayu yang dikeringkan dan dianyam.

Masyarakat Malasigi juga mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam menyeimbangkan aktivitas wisata dan keberlangsungan hutan sebagai ruang hidup mereka. Misalnya wisatawan yang datang wajib mematuhi SOP dan peraturan adat yang ada. Selain itu, wisatawan juga dibagikan pengetahuan tentang kebiasaan burung, tempat burung biasa singgah, cara mengamati burung agar tidak mengganggu, dan lain sebagainya oleh pemandu wisata. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki pengetahuan yang dibentuk oleh pengalaman hidupnya dan pemandu wisata yang menjadi jembatan yang menghubungkan antara pengetahuan masyarakat kepada wisatawan sehingga wisatawan dapat memahami kebiasaan.

Manfaat Ekonomi dan Penguatan Identitas

Aktivitas wisata berkontribusi secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sejatinya masyarakat Malasigi bergantung pada aktivitas wisata. Ketika tidak ada wisatawan, masyarakat lebih sering menghabiskan waktu untuk berbincang atau menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan sosial. Masyarakat baru akan mencari uang ketika merasa dibutuhkan dan akan pergi berburu ketika tidak ada wisatawan. Tentu, hal ini tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan dan kebiasaan masyarakat untuk mengambil dari alam secukupnya sesuai dengan kebutuhan.

Keuntungan ekonomi diambil dari setiap paket kegiatan wisata. Setiap kegiatan wisata seperti jasa pemanduan *trekking* dan pengamatan burung; penyediaan *homestay*; penyediaan konsumsi memiliki nilai jasanya masing-masing dan diterima sesuai dengan anggota yang bertanggung jawab atas tugas tertentu tersebut. Mayoritas pemuda bertanggung jawab dalam jasa pemanduan *trekking*, pengamatan burung, dan penjelasan mengenai keanekaragaman hayati. Kompensasi ekonomi dari kegiatan tersebut diberikan langsung kepada pemuda yang menjadi *tour guide*. Selanjutnya, tugas penyediaan konsumsi didominasi oleh kelompok ibu-ibu yang nilai jasa masak akan diterima oleh kelompok ibu-ibu yang membantu menyediakan

konsumsi. Hal yang sama juga berlaku dalam penyediaan akomodasi baik *homestay* maupun *glamping* yang mayoritas diterima oleh anggota yang mendirikan atau menyiapkan *homestay* dan *glamping*. Lebih lanjut, terdapat uang kebersihan dan kontribusi terhadap keberlanjutan wisata yang akan masuk ke dana bersama Pokdarwis.

Selain manfaat ekonomi, aktivitas wisata juga memperkuat identitas dan legitimasi sosial masyarakat adat. Aktivitas wisata yang terus berkembang mendorong rekognisi berbagai pihak. Penguatan rekognisi ini ditunjukkan dari berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun regional yang diperoleh oleh Malasigi, seperti Anugrah Desa Wisata, *Local Hero*, Pemuda Pelopor, dan lain sebagainya. Hal ini mendorong kepada rekognisi wisata ilmiah di Malasigi dan berbagai insentif untuk mendukung pengembangan wisata.

Selain itu, aktivitas wisata memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan budaya dengan masyarakat adat sebagai aktor utama. Masyarakat adat memiliki ruang untuk membagikan pengetahuan lokalnya yang penuh dengan nilai-nilai keberlanjutan dalam menghargai dan menjaga alam kepada wisatawan. Bahkan, masyarakat Malasigi cenderung melihat wisata sebagai aktivitas yang membanggakan karena dapat mendatangkan dan mengenalkan Malasigi kepada wisatawan. Menurut mereka, rekognisi ini sejatinya lebih penting dan bersifat prestise daripada hanya sebatas keuntungan material.

Secara lebih luas, wisata di Malasigi berperan dalam menumbuhkan kesadaran kolektif bagi wisatawan maupun masyarakat secara lebih luas untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara cukup dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekologi. Praktik wisata yang dikembangkan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak harus dicapai melalui eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Melalui pendekatan ini, masyarakat Malasigi memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan tanpa mengubah atau merusak lanskap ekologis yang telah ada.

Lebih lanjut, menurut masyarakat Malasigi aktivitas wisata yang berkelanjutan merupakan salah satu strategi untuk menjaga hutan mereka. Dengan adanya wisata, masyarakat memiliki tambahan pendapatan dan tetap dapat memenuhi kebutuhan mereka secara cukup tanpa perlu mengeksploitasi alam secara

berlebihan. Ketika banyak terjadi penebangan pohon dan pembukaan lahan sawit di sekitar wilayah Malasigi, masyarakat Malasigi justru berusaha keras untuk menjaga hutan mereka meskipun tidak mendapatkan keuntungan ekonomi secara “instan”. Mereka berpegang teguh dengan nilai-nilai adat mereka yang penuh dengan landasan epistemik akan kehidupan yang terkait erat dengan hutan sebagai ruang hidup ekologis mereka. Dengan wisatalah kemudian masyarakat Malasigi lebih di rekognisi dan kemudian menjadi potensi yang perlu dijaga dan dikembangkan. Hingga pada akhirnya, masyarakat Malasigi menerima SK Perhutanan Sosial (SK MENLHK Nomor: SK.8557/MENLHKPSK/PKPS/PSL.0/8/2023) sejak tanggal 18 September 2023 untuk hutan mereka seluas 1.750 hektar yang kemudian dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) Belempe.

Dengan adanya SK Perhutanan Sosial, masyarakat memiliki perlindungan atas gangguan pihak eksternal yang memiliki risiko merusak hutan mereka. Selain itu, masyarakat adat memiliki hak untuk menggunakan hutan sebagai pemenuhan kebutuhan dan aktivitas wisata. Dengan nilai-nilai yang dianut, keberlangsungan hutan Malasigi terjaga dan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melalui wisata dan aktivitas pemanfaatan hutan secukupnya sesuai kebutuhan.

Diskusi

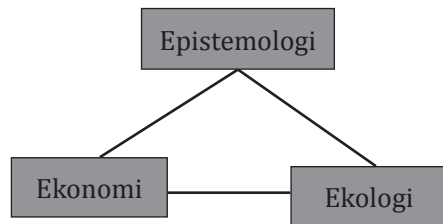
Pariwisata Ilmiah dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

Kombinasi antara potensi alam dan budaya menjadi fondasi kuat dan atraksi wisata yang tidak hanya mengandalkan daya tarik fisik saja, tetapi juga kearifan lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata. Berbagai potensi yang ada baik dari internal maupun eksternal Malasigi dapat melahirkan peluang-peluang pengembangan wisata yang lebih luas, salah satunya adalah praktik wisata ilmiah. Pengembangan pariwisata ilmiah di Malasigi ini tidak hanya linier dengan embryonya aktivitas ekowisata yang sudah berjalan, tetapi juga mampu menguatkan keberlanjutan wisata secara holistik. Dengan penegasan pariwisata ilmiah yang berjalan beriringan dengan wisata saat ini, target wisatawan dapat menjadi lebih spesifik.

Target wisatawan yang spesifik dapat membawa dampak positif karena mampu mengoptimalkan *branding* serta menjaga

keseimbangan aktivitas ekonomi dan alam tetap berjalan. Dengan karakteristik yang ada, Malasigi dapat menarget jenis wisatawan, seperti *wild photographer, zoologist, anthropologist, conservationist, forest scientist*, atau orang-orang yang memiliki minat khusus berkaitan dengan alam. Wisata ilmiah dengan target pasar yang spesifik ini dapat membatasi (*gatekeeping*) wisatawan dengan karakteristik tertentu karena wisatawan yang datang setidaknya-tidaknya memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang menjaga keberlanjutan ekonomi. Dengan begitu, dapat mengurangi risiko kedatangan wisatawan dengan karakter destruktif yang dapat membawa risiko-risiko, seperti sampah yang berlebihan, kerusakan fasilitas, gangguan terhadap habitat satwa di dalam hutan, atau bahkan penangkapan satwa. Selain itu, target wisatawan dengan karakteristik wisata ilmiah ini cenderung memiliki *willingness to pay* yang tinggi baik untuk menjalankan hobinya maupun untuk menjaga keberlangsungan aktivitas pengembangan wisata oleh masyarakat sehingga meskipun memiliki target yang spesifik, masyarakat tetap dapat merasakan manfaat ekonomi dari wisatanya.

Selain itu, pengembangan wisata ilmiah di Malasigi memungkinkan adanya sinkronisasi antara inovasi sosial yang berasal dari eksternal dan pengetahuan lokal yang kental dengan nilai adat istiadat dari Malasigi. Proses sinkronisasi ini berperan dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan yang secara bersamaan memastikan bahwa inovasi dari pihak eksternal tidak mereduksi dan mengesampingkan kerangka epistemologi lokal. Melalui aktivitas wisata ini, masyarakat adat memiliki peran sentral sebagai pemilik dan penyampai pengetahuan yang penuh dengan nilai-nilai konservasi alam. Dengan begitu, wisata ilmiah juga menjadi jawaban untuk aktivitas ekonomi yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Hal ini tidak terlepas dengan adanya fenomena penebangan pohon secara masif di kawasan hutan Provinsi Barat Daya yang tidak hanya membuat kawasan hutan semakin berkurang, tetapi juga membuat jalan akses ke desa-desa termasuk Malasigi menjadi rusak karena jenis tanah merahnya yang sering dilewati truk muatan berat. Praktik wisata ilmiah tidak hanya membuat kawasan hutan Malasigi tetap terjaga melalui semangat konservasi, tetapi juga memperluas kesadaran publik terhadap pentingnya keberlanjutan ekologi.



Gambar 2. Kerangka harmonisasi keberlanjutan wisata ilmiah

Sumber: Desanomia, 2025 (data diolah)

Wisata Ilmiah dapat menjadi salah satu bentuk yang dapat memmanifestasikan harmonisasi kehidupan komunitas lokal di level desa, yaitu dimensi pengetahuan lokal, ekonomi, dan ekologi. Wisata ilmiah memungkinkan rekognisi penuh terhadap fondasi epistemik masyarakat. Rekognisi terhadap pengetahuan lokal masyarakat adat dapat menjamin keberlangsungan ekologi karena masyarakat adat memiliki nilai-nilai konservasi lingkungan yang bahkan sudah mengakar kuat tanpa intervensi dari eksternal. Nilai-nilai ini terbentuk dari relasi mereka dengan hutan sebagai ruang hidupnya yang berasal dari pengalaman saat ini dan pengalaman yang diwariskan yang kemudian membentuk peraturan adat, tradisi, cerita rakyat, mitos, kesenian, dan lain sebagainya. Pengetahuan lokal yang sering kali dikesampingkan dalam praktik pembangunan atau bahkan pemberdayaan dalam wisata ilmiah diposisikan sebagai sesuatu yang esensial dan bahkan berpotensi untuk dipelajari. Hal ini membuka jalan kepada *knowledge sharing* antara pengetahuan akademik dengan pengetahuan lokal dengan posisi yang sama tidak hanya untuk manfaat penelitian dan masyarakat lokal saja, tetapi juga membuka potensi untuk menemukan jawaban atas praktik pembangunan yang berkelanjutan dari adanya sinkronisasi pengetahuan lokal dan pengetahuan akademik.

Rekognisi atas pengetahuan lokal dan keberlangsungan ekologi ini kemudian juga dapat membuka peluang-peluang kesejahteraan secara ekonomi. Aktivitas wisata yang dibangun sejak awal secara kolektif dengan pembagian peran masing-masing menjadi strategi dan pengetahuan masyarakat dalam menjalankan tindakan ekonomi yang memberikan timbal balik keuntungan ekonomi secara material. Kedatangan wisatawan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat.

Dari berbagai temuan dan dialog bersama masyarakat, terdapat beberapa model pariwisata ilmiah yang dapat dilakukan. Model wisata ilmiah dapat dipisahkan menjadi dua kluster, yaitu yang berbasis alam dan yang berbasis pengetahuan lokal. Wisata ilmiah berbasis alam dapat menawarkan keindahan flora fauna yang tidak hanya terbatas pada pengamatan burung cendrawasih endemik saja, tetapi juga pengamatan terhadap reptil, amfibi, flora, dan lain sebagainya. Banyak endemik di Malasigi yang menjadi daya tarik tersendiri seperti kodok pinokio, burung pitta, dan lain sebagainya. Ini dapat menjadi pengembangan keilmuan sekaligus mengembangkan pasar wisatawan ilmiah ke Malasigi. Wisata alam lainnya yang dapat dilakukan adalah mengenai aspek geografi seperti speleologi khususnya di Gua Wo'batiwala dengan formasi formasi stalaktit, stalagmit, serta peran gua dalam siklus air dan ekosistem ataupun kelelawar yang hidup di gua ini. Selain wisata berbasis alam, dapat juga ditawarkan wisata ilmiah budaya berbasis pengetahuan lokal seperti gastronomi lokal, balobe, loka karya pembuatan noken, loka karya Tarian Alen, *ethnobotany* (hubungan masyarakat Malasigi dengan tumbuhan obat tradisional, bahan pangan), *ethnozoology* (peran fauna dalam ritual adat atau kepercayaan lokal), *ethnomedicine* (pengetahuan pengobatan tradisional berbasis tanaman obat), *ethnoecology* (filosofi adat tentang keseimbangan ekologi), dan lain sebagainya.

Pariwisata Ilmiah dalam Kerangka Pembangunan Endogen Masyarakat Adat Malasigi

Pariwisata ilmiah di Kampung Adat Malasigi menunjukkan bentuk nyata dari praktik pembangunan endogen yang berakar pada kekuatan internal masyarakat baik dari aspek sosial, budaya, ekologis, maupun pengetahuan lokal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama yang memanfaatkan modal sosial, pengetahuan adat, serta kearifan ekologi dalam membangun sistem pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata ilmiah di Malasigi lahir dari embrio ekowisata yang tumbuh secara swadaya dan kemudian berkembang melalui kolaborasi multipihak, termasuk dengan NGO (FFI), akademisi (Unimuda, Unimal, Unas, UGM), dan korporasi (PT PEP Papua Field) yang menggunakan skema *community-*

based CSR. Dalam proses ini, penguatan modal sosial menjadi pilar utama yang tercermin dari gotong-royong dalam membangun jalur trekking, pembagian peran berbasis gender dalam aktivitas wisata, hingga mekanisme penyelesaian konflik berbasis nilai adat.

Sejalan dengan prinsip pembangunan endogen, masyarakat Malasigi memanfaatkan epistemologi lokal mereka sebagai kerangka kerja dalam mengelola sumber daya. Nilai-nilai adat seperti "Hutan adalah Mama" bukan hanya narasi kultural, tetapi menjadi basis etika ekologis yang memandu masyarakat dalam menjaga hutan dan mengelola wisata tanpa merusak lanskap alami. Pariwisata ilmiah tidak merusak pengetahuan ini, justru memperkuatnya melalui interaksi dengan pengetahuan eksternal seperti konservasi modern, ekologi ilmiah, dan pengelolaan berbasis data. Sinkronisasi antara inovasi dari luar dan pengetahuan lokal ini memungkinkan transfer pengetahuan yang tidak hegemonik, tetapi justru saling melengkapi. Ini menjadi contoh bagaimana pembangunan endogen tidak menolak intervensi eksternal, tetapi menyaring dan menyesuaikannya agar selaras dengan nilai komunitas.

Lebih lanjut, pariwisata ilmiah juga berperan dalam memperluas kapasitas ekonomi masyarakat adat secara kontekstual dan beretika. Aktivitas seperti pemanduan pengamatan cendrawasih, penyediaan homestay, konsumsi lokal, serta atraksi budaya tidak hanya memberikan pemasukan ekonomi yang merata, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan legitimasi adat. Masyarakat tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Strategi pembatasan wisatawan pada kelompok-kelompok tertentu seperti peneliti, fotografer alam liar, atau pecinta konservasi menjadi mekanisme ekologis dan sosial untuk mencegah eksploitasi massal. Karakteristik wisatawan dengan willingness to pay tinggi dan kesadaran ekologi menjadi kekuatan tersendiri bagi keberlanjutan model ini.

Dukungan dari PT PEP Papua Field melalui program MATA HATI MALASIGI memperlihatkan bagaimana *community-based* CSR dapat menyatu dengan model pembangunan endogen. Alih-alih mendominasi proses, korporasi hadir sebagai fasilitator mengisi celah teknis, finansial, dan jaringan. Pendekatan ini juga memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya eksternal, seperti teknologi penyaring air dari

pelepeh pisang, pengembangan *agroforestry*, hingga jaringan akademik nasional. Kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa pembangunan endogen bukan pembangunan yang eksklusif dan tertutup, tetapi terbuka secara selektif terhadap dukungan eksternal yang menghormati nilai-nilai lokal dan memperkuat kapasitas internal masyarakat.

Dengan pendekatan endogen berbasis pariwisata ilmiah, masyarakat adat Malasigi berhasil membuktikan bahwa penguatan identitas budaya, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan dapat berjalan beriringan. Pariwisata ilmiah juga telah menjadi narasi kolektif masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah dan hutan mereka yang dibuktikan dari keberhasilan mereka memperoleh SK Perhutanan Sosial. Pada konteks ini, pariwisata ilmiah di Malasigi bukan hanya sebagai sarana pariwisata, tetapi menjadi strategi politik-kultural untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat adat dari ancaman ekstraktif. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata ilmiah yang berbasis pada pembangunan endogen tidak hanya relevan untuk Malasigi, tetapi juga menjadi model alternatif bagi daerah-daerah adat lain yang ingin membangun tanpa harus kehilangan jati diri mereka.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi pariwisata ilmiah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat telah secara inklusif dan kontekstual dalam mendorong pemberdayaan masyarakat adat secara berkelanjutan. Praktik baik yang terjadi di Kampung Adat Malasigi menunjukkan bahwa ketika masyarakat adat diposisikan sebagai subjek aktif dalam pengelolaan wisata, pengambilan keputusan, serta pelestarian lingkungan dan budaya, maka pariwisata dapat bertransformasi menjadi alat pembangunan endogen yang memperkuat identitas lokal, kohesi sosial, dan kemandirian ekonomi. Pendekatan ini menggabungkan modal sosial, budaya, dan ekologis masyarakat dengan jejaring kolaborasi eksternal, termasuk sektor korporasi dan akademisi, guna menciptakan praktik pengelolaan wisata yang adaptif, inklusif, dan beretika.

Pariwisata ilmiah di Malasigi tidak sekadar menciptakan destinasi wisata berbasis pengetahuan, melainkan juga menjadi ruang

bagi pertukaran nilai antara epistemologi lokal dan pengetahuan ilmiah, tanpa mengorbankan struktur sosial dan lanskap ekologis yang telah ada. Melalui melibatkan aktif masyarakat dalam aktivitas konservasi, dokumentasi keanekaragaman hayati, dan penyediaan layanan wisata berbasis budaya, pariwisata ilmiah menjadi mekanisme distribusi manfaat yang adil dan partisipatif. Selain memberikan dampak ekonomi yang nyata, model ini juga memperkuat legitimasi sosial masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas wilayah dan pengetahuan tradisional mereka, sebagaimana tercermin dari keberhasilan memperoleh SK Perhutanan Sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pariwisata ilmiah berbasis pemberdayaan masyarakat adat tidak hanya relevan untuk mendukung pencapaian SDGs, tetapi juga mampu menjadi model strategis pembangunan alternatif yang memperkuat posisi tawar masyarakat adat di tengah tekanan pembangunan yang cenderung eksploitatif. Model ini dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan masyarakat di wilayah adat lain di Indonesia, asalkan tetap menjaga prinsip-prinsip etika, keberlanjutan, dan pengakuan terhadap hak-hak kolektif serta pengetahuan lokal masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga tetaplah memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada satu kasus studi, serta pendekatan kualitatif yang belum mampu mengukur dampaknya secara kuantitatif. Oleh karena itu, guna memperkuat generalisasi dan memperluas pemahaman, studi lanjutan disarankan untuk mengembangkan metode kuantitatif, seperti penghitungan *Social Return on Investment* (SROI), penilaian ekonomi multipihak, serta studi komparatif lintas masyarakat adat dan sektor industri lainnya. Penelitian multidisipliner yang menggabungkan pendekatan sosial, ekonomi, dan ekologis juga akan memperkaya kerangka teoritis dan praktik dalam pengembangan pariwisata ilmiah berbasis pemberdayaan masyarakat adat di masa depan.

Referensi

Balmford, A., Beresford, J., Green, J., Naidoo, R., Walpole, M., & Manica, A. (2009). A global perspective on trends in nature-based tourism. *PLoS Biology*, 7(6), e1000144.

- Beeton, S. (2006). *Community development through tourism*. Landlinks Press.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545-547.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80-88.
- Desanomia. (2025, 21 Mei). *Desa: ekologi, ekonomi, dan epistemologi*. Desanomia. Diakses dari <https://desanomia.id/desa-ekologi-ekonomi-dan-epistemologi/>
- Epler, B. (2007). *Tourism, the economy, population growth, and conservation in Galapagos*. Charles Darwin Foundation.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-based tourism: A success? *ICRT Occasional Paper*, 11(1), 1-37.
- Higham, J., & Lück, M. (2002). Urban ecotourism: A contradiction in terms? *Journal of Ecotourism*, 1(1), 36-51. <https://doi.org/10.1080/14724040208668111>.
- Kafa, A. K. (2019). Social Capital and Multi-Stakeholders Cooperation as a Foundation of Corporate Social Responsibility. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(3), 365-381. <https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i3.4158>.
- Kalami, T., & Wahyudi, L. S. (2022, September 16). *Kambik: Sekolah adat suku Moi*. EcoNusa Foundation. <https://econusa.id/id/ecoblog/kambik-sekolah-adat-suku-moi/>.
- Kartiko, W. N. (2025). *Kontestasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagai Arena Sosial Politik: Praktik Agensi dalam Dinamika Perencanaan Pembangunan Desa di Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo*. [Unpublished thesis]. Universitas Gadjah Mada.
- Karso, A. J. (2025). Natural resources governance and the vulnerability of indigenous communities in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 7, 1601480. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1601480>.
- Kennedy, C. M., Fariss, B., Oakleaf, J. R., Garnett, S. T., Fernández-Llamazares, Á., Fa, J. E., Baruch-Mordo, S., & Kiesecker, J. (2023). Indigenous Peoples' lands are threatened by industrial development; conversion risk assessment reveals the need to support Indigenous stewardship. *One Earth*, 6(8), 1032-1049. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.07.006>.

- Krisdyatmiko. (2012). Kemitraan Pemerintah-Swasta-Masyarakat dalam Bingkai Forum Multi-Stakeholders Corporate Social Responsibility (MSH-CSR). In Susetiawan (Ed.), *Corporate Social Responsibility: Komitmen untuk Pemberdayaan Masyarakat* (pp. 127–171). Azzagrafika.
- Leaper, R., & Milne, S. (2008). The role of cultural tourism in community development. In G. Richards (Ed.), *Cultural tourism: Global and local perspectives* (pp. 79–99). Haworth Press.
- Mbaiwa, J. E., & Stronza, A. L. (2010). The effects of tourism development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(5), 635-656.
- Melenez-Roman, J., Font, X., Torres-Delgado, A., & Rodríguez Sánchez, I. (2025). Co-creating sustainability innovations in a tourism destination: A participatory research design from Barcelona. *Journal of Sustainable Tourism*.
- Merriam, S. B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education*. Jossey-Bass Publishers
- Miller, M. L., Auyong, J., & Hadley, N. P. (2010). *Sustaining marine and coastal tourism: A global perspective on developing sustainable tourism*. CAB International.
- Orams, M. B. (1997). The effectiveness of environmental education: Can we turn tourists into “greenies”? *Progress in Tourism and Hospitality Research*, 3(4), 295–306.
- Orams, M. B., & Leane, J. (2005). *Wildlife tourism*. In W. F. Theobald (Ed.), *Global tourism* (3rd ed., pp. 259–276). Elsevier
- Rodríguez-Herrera, I. M., Casado-Montilla, J., López-Molina, D., & Pulido-Fernández, J. I. (2025). *Applying stakeholder theory and social network analysis when studying the social capital of tourism destinations*. *PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 23(3), 633–655. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2025.23.041>
- Schilling-Vacaflor, A., & Flemmer, R. (2015). Conflict transformation through prior consultation? Lessons from Peru. *Journal of Latin American Studies*, 47(4), 811-839.
- Shonhe, Toendepi., & Tsitsidzashe, Bvute. (2021). Globalization, Climate Change and Uneven Development in Africa: The Zimbabwe Farmers Experience. *African Renaissance*, 2021(1), pp. 167-197.
- Smith, M. K., & Richards, G. (2013). *The Routledge handbook of cultural tourism*. Routledge.
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook*. Responsible Ecological Social Tour Project.
- Survival International. (2016). *Progress can kill: How imposed development destroys the health of tribal peoples*. Survival International.
- Susetiawan., Damanik, J., Krisdyatmiko., Prihatin, S. D., Eddyono, S., Suyatna, H., Pinem, M. L. (2023). *Metode Penelitian Pembangunan Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Tauli-Corpuz, V., Alcorn, J., & Molnar, A. (2018). *Cornered by Protected Areas: Replacing “Fortress” Conservation with Rights-Based Approaches Helps Bring Justice for Indigenous Peoples and Local Communities, Reduces Conflict, and Enables Cost-Effective Conservation and Climate Action*. <https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/06/Cornered-by-PAs->
- Wall, G., & Mathieson, A. (2006). *Tourism: Change, impacts and opportunities*. Pearson Education.
- Wearing, S., & Neil, J. (2009). *Ecotourism: Impacts, potentials and possibilities* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Weaver, D. (2011). *Contemporary tourism*. Elsevier.
- Wood, M. E. (2002). *Ecotourism: Principles, practices & policies for sustainability*. United Nations Environment Programme.
- Yin, R.K. (1981). The case study as a serious research strategy. *Knowledge*, 3(1), 97-114. <https://doi.org/10.1177/107554708100300106>.
- Yin, R. K. (1981). The case study crisis: some answers. *Administrative Science Quarterly*, 26(1), 58-65. <https://doi.org/10.2307/2392599>.
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: design and methods*. Sage Publications